

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **Kurikulum Merdeka Jenjang SD/MI**

##### **Pengertian Kurikulum Merdeka Jenjang SD/MI**

Secara istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang makna dari kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu, ada juga kesamaannya. Kesamaan tersebut adalah bahwa kurikulum memiliki hubungan yang cukup erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum memang diperuntukkan untuk anak didik, seperti yang diungkapkan Murray Print (1993) yang mengungkapkan bahwa kurikulum meliputi perencanaan pengamatan belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun.

Menurut Saylor, Alexander & Lewis (1981) pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan.<sup>17</sup> Pandangan yang menganggap kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran merupakan pandangan yang dianggap tradisional, walaupun sebenarnya masih banyak dianut orang dan mewarnai kurikulum yang berlaku dewasa ini.

---

<sup>17</sup>Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Kencana, 2015), 8.

Kurikulum yang saat ini maknanya bergeser dari sejumlah mata pelajaran kepada pengalaman, selain disebabkan meluasnya fungsi dan tanggung jawab sekolah, juga dipengaruhi oleh penemuan-penemuan dan pandangan-pandangan baru khususnya penemuan dalam bidang psikologi belajar. Karena dalam proses belajar, pengalaman dianggap lebih penting daripada hanya sekedar menumpuk sejumlah pengetahuan.<sup>18</sup>

Guna memajukan pendidikan di Indonesia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bapak Nadiem Makarim membuat salah satu program inisiatif kurikulum terbaru yakni Kurikulum Merdeka Belajar yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Merdeka belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. Konsep Merdeka Belajar adalah mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang untuk memberikan kemerdekaan sekolah menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka (Sherly dkk, 2021).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nadiem Makarim membuat kebijakan merdeka belajar salah satunya dikarenakan hasil penelitian *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2019, menunjukkan hasil penilaian peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Kondisi Indonesia yang rendah ini memerlukan sebuah langkah revolusioner untuk dapat mengatasinya, salah satunya dengan program merdeka belajar dan juga sebagai salah satu strategi dalam pengembangan pendidikan karakter.

---

<sup>18</sup>Pyayitno, *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2009), 6–7.

Merdeka belajar merupakan langkah tepat mencapai pendidikan ideal yang sesuai dengan kondisi saat ini. Tujuannya untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Merdeka belajar sangat memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Merdeka belajar memberi kebebasan kepada peserta didik dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri mereka. Selama ini pendidikan lebih menekankan terhadap aspek pengetahuan.<sup>19</sup>

Kurikulum merdeka ialah merupakan sistem merdeka belajar yang dapat dipahami sebagai merdeka berpikir dan berkarya, serta menghormati atau merespons perubahan yang terjadi. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan *outing class*, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, kompetisi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang.<sup>20</sup>

Jadi Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar

---

<sup>19</sup>Purwaningrum dan dkk, *Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka*, 4.

<sup>20</sup>Khairunisa, "Kecemasan Berbicara di Depan Kelas pada Peserta Didik Sekolah Dasar," *Jurnal Tunas Bangsa* 6 (2019): 139–40, <https://ejournal.bbg.ac.id/tunasbangsa/article/view/959>.

peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan guna menggapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.<sup>21</sup>

### **Kebijakan Kurikulum Merdeka Jenjang SD/MI**

Salah satu syarat kriteria agar sekolah boleh menerapkan kurikulum merdeka ialah berminat menerapkan Kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah/madrasah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi.<sup>22</sup>

Kurikulum merdeka sebagai kebijakan baru hal ini telah dipaparkan oleh Nadiem Makarim kepada para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta, 11 Desember 2019. Dengan

---

<sup>21</sup>Rahimah, "Peningkatan Kemampuan Guru SMP Negeri 10 Kota Tebingtinggi dalam Menyusun Modul Ajar Kurikulum Merdeka Melalui Kegiatan Pendampingan Tahun Ajar 2021/2022," *Ansiru PAI* 6 (2022): 97, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/12537>.

<sup>22</sup>Rahimah, 97.

demikian, Nadiem memaparkan empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yakni:<sup>23</sup>

- a. Ujian Nasional (UN) yang akan ditiadakan dan diganti dengan *Assesment* Kompetensi Minimum serta Survei Karakter. Dalam hal ini bahwa kemampuanmenalar dalam literasi dan numerik yang didasari dengan praktik terbaik tesPISA. Hal ini tentu berbeda dengan UN yang dijadwalkan akan terlaksana padaakhir jenjang pendidikan. Namun, *Assesment* dilaksanakan di tingkat kelas IV. Dari sistem penilaian yang telah dilakukan inovasi ini, tentumemiliki harapan bahwa pada hasilnya dapat memberi masukan bagi sekolahdalam memperbaiki proses pembelajaran sebelum peserta didik menyelesaikanpendidikannya.
- b. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) terkait kebijakan ini bahwa USBNdiserahkan seutuhnya pada sekolah masing-masing. Menurut Kemendikbud,sekolah diberikan keleluasan dalam menentukan penilaian bisa dengan memberikan tugas.
- c. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Nadiem Makarimmengatakan, RPP cukup dibuat dalam satu halaman tanpa harus ratusanhalaman. Tidak hanya itu, penyederhanaan administrasi diharapkan parapendidikan mampu mengalihkan kegiatan belajar dengan capaianmeningkatkan kompetensi.
- d. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yakni terkait kebijakan PPDB lebihditekankan dengan penerapan sistem zonasi, namun tidak termasuk wilayah3T. Dengan demikian, bahwa peserta didik yang melalui jalur

---

<sup>23</sup>Khairunisa, "Kecemasan Berbicara di Depan Kelas pada Peserta Didik Sekolah Dasar," 140–41.

afirmasi dan prestasi lebih memiliki kesempatan yang banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis dalam menentukan daerah zonasi.

### **Keunikan dan Kelebihan Kurikulum Merdeka Jenjang SD/MI**

Terdapat beberapa keunikan atau karakteristik utama dari kurikulum merdeka yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah:<sup>24</sup>

- a. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila
- b. Fokus pada materi esensial jadi ada waktu cukup untuk pembelajaran lebih dalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
- c. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Adapun beberapa kelebihan dari Kurikulum Merdeka adalah:<sup>25</sup>

- a. Lebih sederhana dan mendalam

Materi yang esensial menjadi fokus pada Kurikulum Merdeka. Pembelajaran sederhana dan mendalam tak tergesa-gesa akan lebih diserap peserta didik. Pembelajaran mendalam dengan rancangan yang menyenangkan akan membuat peserta didik lebih fokus dan tertarik dalam belajar.

- b. Lebih merdeka

---

<sup>24</sup>Rahimah, "Peningkatan Kemampuan Guru SMP Negeri 10 Kota Tebingtinggi dalam Menyusun Modul Ajar Kurikulum Merdeka Melalui Kegiatan Pendampingan Tahun Ajar 2021/2022," 98.

<sup>25</sup>Khoirurrijal dan dkk, *Pengembangan Kurikulum Merdeka* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 20–21.

Konsep merdeka pada kurikulum merdeka yang diberikan memberikan kemerdekaan kepada guru dalam merancang proses pembelajaran sesuai kebutuhan dan capaian pembelajaran. Proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pendoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka).<sup>19</sup> Bab 2 dirancang sesuai kebutuhan akan menjadi baik bila diterapkan, dibandingkan dengan merancang dengan tidak melihat kebutuhan peserta didik.

c. Lebih relevan dan interaktif

Kegiatan proses pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif akan berdampak baik bila diterapkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang interaktif akan membuat peserta didik lebih tertarik dan bisa mengembangkan kompetensinya. Pembelajaran interaktif dengan membuat suatu proyek akan membuat peserta didik menjadi aktif dalam mengembangkan isu-isu yang beredar di lingkungan.

Kurikulum Merdeka yang diterapkan akan lebih sederhana dan mendalam karena jam pelajaran pada ini yaitu 1 jam untuk intrakurikuler dan 1 jam untuk penguatan Profil Pancasila. Pembelajaran lebih merdeka juga menjadi kelebihan dari Kurikulum Merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan hak otonom kepada sekolah untuk merancang sesuai dengan kebutuhannya.

### **Tujuan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SD/MI**

Menurut Marisa (2021), Nadiem Makarim terdorong untuk melakukan inovasi dalam menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa

membebani pendidik ataupun peserta didik dengan harus memiliki ketercapaian tinggi berupa skor atau kriteria ketuntasan minimal. Tujuan merdeka belajar adalah agar guru, siswa dan orang tua dapat memiliki suasana yang menyenangkan. Merdeka belajar berarti proses pendidikan harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Bahagia untuk siapa? Bahagia untuk guru, bahagia untuk siswa, bahagia untuk orang tua, dan bahagia untuk semua orang.<sup>26</sup>

Tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Pertama, pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap.<sup>27</sup>

### **Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SD/MI**

Implementasi adalah usaha dalam menerapkan suatu hal. Implementasi merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan ketika perencanaan sudah sempurna yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang terencana.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Khairunisa, "Kecemasan Berbicara di Depan Kelas pada Peserta Didik Sekolah Dasar," 139.

<sup>27</sup>Rahimah, "Peningkatan Kemampuan Guru SMP Negeri 10 Kota Tebingtinggi dalam Menyusun Modul Ajar Kurikulum Merdeka Melalui Kegiatan Pendampingan Tahun Ajar 2021/2022," 98.

<sup>28</sup>Khori A. Mudrikah dan Hamdani H., "Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Islam Nusantara," *Islamic Management* 5 (2022): 34, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/jim/article/view/2177>.

Dalam implementasi kurikulum ada perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian terhadap pelaksanaan yaitu:

1. Tahap perencanaan yakni menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan.
2. Tahap pelaksanaan yakni menjadikan perencanaan sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.
3. Tahap evaluasi yakni merupakan proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan.

Adapun tujuan dari implementasi penerapan Kurikulum Merdeka melalui program kampus mengajar perintis di sekolah dasar yaitu membantu menyelesaikan problematika di persekolahan akibat dampak dari pandemi. Kegiatannya berupa membimbing peserta didik dan memberdayakan peralatan sekolah dalam rangka proses belajar mengajar. Dalam penerapan Kurikulum Merdeka terdapat intrakurikuler serta penguatan profil pancasila dan ekstrakurikuler, serta dengan mengalokasikan waktu akan dirancang hingga satu tahun serta dilengkapi dengan alokasi jam pelajaran yang disampaikan setiap minggunya.

Kurikulum Merdeka bisa saja terus dilakukan dengan beberapa syarat. Pertama, regulasi yang fundamental, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedua, melihat dari asesmen nasional dengan tujuan mengukur penalaran dari

peserta didik bukan hanya pengetahuan saja. Ketiga, jika publikasi menyebar luas maka kemungkinan kecil Kurikulum Merdeka dihentikan.

Implementasi Kurikulum Merdeka tujuannya jawab keluhan dan masalah yang terjadi di kurikulum sebelumnya. Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilihat di sekolah penggerak, dengan menekankan pada bakat dan minat peserta didik dalam mengembangkan potensi yang mereka punya. Implementasi kurikulum ini dapat menjadikan peserta didik berkompeten sesuai bidangnya, serta dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa sekarang.<sup>29</sup>

Implementasi dilakukan ketika perencanaan sudah sempurna yang berlanjut pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang sesuai perencanaan. Implementasi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan yang lain. Misalnya sumber daya manusia, alam, sarana, prasarana, dan pendanaan. Kaitannya dengan implementasi MBKM di lingkungan sekolah tingkat dasar tentu dipengaruhi oleh kurikulum, kelas, peserta didik, guru, hingga pendanaan yang tidak murah.

Implementasi dari Kurikulum Merdeka Belajar jika dijalankan sesuai fungsinya pasti akan berjalan dengan baik. Kurikulum ini juga sangat membantu menyelesaikan problematika sekolah selama masa Covid19, dimana pembelajarannya dari rumah (*online*). Pembelajaran menggunakan kurikulum lama dengan metode lama tentu tidak akan efektif dan tidak efisien lagi. Selain menjadikan peserta didik tidak memahami

---

<sup>29</sup>Mudrikah dan H., 36–37.

secara keseluruhan tentang pembelajaran, guru pun juga bingung bagaimana cara membuat peserta didik mengerti dengan materi ajar.

Konsep merdeka belajar merupakan konsep yang memberikan kemerdekaan dalam belajar untuk mengusahakan kesiapan lulusan dari sekolah dasar negeri maupun swasta agar mampu menghadapi perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat.<sup>30</sup>

### **Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SD/MI**

Program Kurikulum MBKM merupakan bagian dari upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Bertujuan mendorong siswa agar bisa menguasai beragam kompetensi sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tertuang di dalam Kebijakan Merdeka Belajar dinyatakan bahwa Kampus Merdeka diharapkan dapat jadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kebijakan atau program pemerintah yang akan diimplementasikan tahun 2021 ini, maka beberapa kemungkinan permasalahan akan terjadi. Permasalahan akan terjadi apabila antara aturan atau kebijakan pemerintah yang diimplementasikan atau dilaksanakan tidak seperti yang diharapkan.

Program MBKM yang dirancang berbeda dengan implementasinya. Adanya kondisi seperti ini akan menyebabkan beberapa permasalahan yang mungkin terjadi, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan pendidikan
- b. Rancangan panduan pelaksanaan Kurikulum MBKM.
- c. Pola pikir dan Kesiapan sumber daya manusia.

---

<sup>30</sup>Khoirurrijal dan dkk, *Pengembangan Kurikulum Merdeka*, 21–23.

- d. Perancangan kurikulum di mata pelajaran.
- e. Hak belajar di dalam maupun di luar mata pelajaran.
- f. Sistem administrasi sekolah.

Pelaksanaan kebijakan program merdeka belajar di sekolah yang mengalami problematika diharapkan segera melaksanakan strategi menyusun panduan bersama antar sekolah untuk implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, juga dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan lembaga sekolah maupun lembaga luar lembaga pendidikan yang bersangkutan. Melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Kurikulum Merdeka kepada guru, tenaga kependidikan, maupun peserta didik juga perlu dilakukan. Tujuannya agar tidak salah dalam mengimplementasikan program tersebut dan memberikan pemahaman terkait konsep guru penggerak dan dosen penggerak.<sup>31</sup>

Strategi, metode, dan kurikulum yang diterapkan di sekolah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan menimbulkan keuntungan ataupun problematika. Kurikulum Merdeka sebagai bentuk kurikulum yang terbaru dalam dunia pendidikan juga pasti tidak akan terlepas dari problematika di dalam penerapannya. Problematika tersebut dapat dilihat dari rencana pelaksanaan pembelajarannya hingga evaluasi pembelajaran yang digunakan. Seharusnya Kurikulum Merdeka lebih memberikan

---

<sup>31</sup>Maghfiroh N. dan M. Sholeh, "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Menghadapi Era Disrupsi dan Era Society 5.0," *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9 (2022): 137–40, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/44137>.

kemudahan kepada guru, serta diharapkan tidak ada permasalahan yang terjadi. Namun, nyatanya masih banyak kendala yang dihadapi.<sup>32</sup>

### **Problematika Guru**

#### **Pengertian Problematika Guru**

Secara etimologi (asal usul kata), istilah "Guru" berasal dari bahasa India yang artinya "orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara". Kemudian menggunakan istilah Shanti Niketan atau rumah damai untuk tempat para guru mengamalkan tugas mulianya membangun spiritualitas anak-anak bangsa di India (*spiritual intelligence*). Jadi guru adalah orang yang kerjanya mengajar." Dengan definisi ini, guru disamakan dengan pengajar. Pengertian guru ini hanya menyebutkan satu sisi yaitu sebagai pengajar, tidak termasuk pengertian guru sebagai pendidik dan pelatih. Guru menjadi pendidik profesional karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. (Suparlan : 2005).<sup>33</sup>

Dalam UU Guru RI No.14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Selanjutnya UU No.20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan, "pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan

---

<sup>32</sup>Khoirurrijal dan dkk, *Pengembangan Kurikulum Merdeka*, 24.

<sup>33</sup>Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), 11.

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.”<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah tenaga pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, dan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.

Istilah problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan (Debdikbud : 2002). Syukir mmengemukakan problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan. Melalui penjelasan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa problematika merupakan persoalan yang perlu dipecahkan akibat tidak tercapainya suatu tujuan.<sup>35</sup>

Yang dimaksud dengan Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 1 ayat 20 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran

---

<sup>34</sup>Depdiknas, “UU RI NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional” (2003).

<sup>35</sup>Djoko Rohadi Wibowo, ‘Problematika Guru SD Dalam Pembelajaran IPS Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19’, 7 (2020), p. 169  
<<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/view/7538>> [accessed 21 September 2022].

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.<sup>36</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan jika problematika guru ialah persoalan-persoalan yang perlu dipecahkan serta diselesaikan oleh para tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mereka yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

### **Macam-Macam Problematika Guru**

Para guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, menghadapi berbagai macam problematika pada waktu kegiatan pembelajaran atau mengabdikan dirinya di sekolah. Terlebih lagi bila guru bertugas di dalam lingkungan yang dinamis, problema yang dihadapi dari waktu ke waktu makin luas, seiring dengan dinamika masyarakat di era globalisasi peradaban modern. Tugas utama guru di dunia pendidikan adalah bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan melalui proses belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas. Berikut beberapa macam-macam problematika yang dihadapi guru, diantaranya:<sup>37</sup>

#### **a. Problematika yang Berhubungan dengan Peserta Didik**

Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik dijadikan sebagai pokok persoalan dalam

---

<sup>36</sup>“Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional” (t.t.).

<sup>37</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 19–21.

semua gerak kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Sebagai pokok persoalan, peserta didik memiliki kedudukan yang menetapkan posisi yang menentukan untuk terjadinya interaksi edukatif. Pada tahap perkembangan kognitifnya, berada dalam tahap operasi konkret dalam berpikir, dimana konsep yang awal masa kanak-kanak merupakan yang samar-samar dan tidak jelas. Kemampuan berpikir ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan mampu memecahkan masalah. Anak sudah lebih mampu berpikir, mengingat dan berkomunikasi. Selain itu, pada masa ini akan mampu berpikir logis mengenai objek dan kejadian, meskipun masih terbatas pada hal-hal yang bersifat konkret, tetapi cara berpikir mereka masih berorientasi pada kekinian.

b. Problematika yang Berhubungan dengan Penguasaan dan Pengembangan Guru dalam Materi Pelajaran

Materi pembelajaran pada hakekatnya merupakan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan sebagai isi dari suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Secara sederhana, materi pembelajaran adalah berbagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung untuk kepentingan kehidupan. Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan tuntutan dan kehidupan peserta didik, sehingga mereka tidak akan terasing dari lingkungan sebagai tempat hidupnya sehari-hari. Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauh mana peserta didik dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan guru. Materi pelajaran itu sendiri adalah

pengetahuan yang bersumber dari mata pelajaran yang diberikan disekolah. Sedangkan mata pelajaran itu sendiri adalah pengalaman-pengalaman manusia masa lalu yang disusun secara sistematis dan logis kemudian diuraikan dalam buku-buku pelajaran dan selanjutnya isi buku itu yang harus dikuasai oleh peserta didik.

c. Problematika yang Berhubungan dengan Metode Pembelajaran

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru untuk kepentingan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugas guru sangat jarang menggunakan suatu metode, tetapi selalu memakai lebih dari satu metode, karena karakteristik metode yang memiliki kelebihan dan kelemahan menuntut guru untuk menggunakan metode yang bervariasi. Metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada murid dalam kelas baik secara individual atau secara kelompok agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan informasi berbeda dengan cara yang ditempuh untuk memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap.

#### d. Problematika yang Berhubungan dengan Sumber Belajar

Sumber belajar dalam arti sempit sering disamakan dengan berbagai jenis buku atau bahan-bahan cetak lainnya yang dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan dalam arti luas, sumber belajar yaitu berbagai daya yang bisa dimanfaatkan guru kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan untuk membantu pengajar maupun peserta didik dalam proses pembelajaran, yang berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan alam sekitar dan sebagainya. Sumber belajar adalah sesuatu yang ada disekitar lingkungan kegiatan yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar, proses berupa interaksi peserta didik dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajarainya.

#### **Problematika Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SD/MI**

Menurut Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada peserta didik. Nadiem menyebutkan, dalam kompetensi guru di level apapun tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi guru di level apapun tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan

pernah ada pembelajaran yang terjadi. Jadi, suksesnya merdeka belajar sangat tergantung dengan kompetensi guru menjalankan kebijakannya.<sup>38</sup>

Implementasi Merdeka Belajar dilihat dari pola yang muncul di lapangan menunjukkan belum sepenuhnya terwujud karena berbagai persoalan. Penyiapan sumber daya manusia serta fasilitas penunjang merupakan beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan Merdeka Belajar. Semua sekolah berusaha beradaptasi dengan kurikulum yang ada saat ini sehingga tujuan pendidikan nasional tetap mampu tercapai. Terdapat beberapa problematika yang dialami oleh guru sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka yaitu.<sup>39</sup>

#### 1. Tidak Memiliki Pengalaman dengan Kemerdekaan Belajar

Salah satu alasan guru belum mampu mengadopsi kemerdekaan belajar dipicu oleh cara dan pengalaman guru belajar di bangku kuliah. Kurangnya rujukan penyelesaian soal dengan variasi metode di buku teks pun diduga sebagai penyebabnya. Minimnya pengalaman pembelajaran dengan cara merdeka ini juga disebabkan saat guru masih menjadi siswa, sebagai mahasiswa calon guru, maupun ketika menjalani pelatihan sebagai guru dalam jabatan.

#### 2. Keterbatasan Referensi

Buku teks yang ada saat ini dinilai masih berkualitas cukup rendah.

Baik buku guru maupun siswa yang diterbitkan pusat perbukuan atau

---

<sup>38</sup>Purwaningrum dan dkk, *Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka*, 8.

<sup>39</sup>Fitria Nurulaeni dan Aulia Rahma, "Analisis Problematika Pelaksanaan Merdeka Belajar," *Jurnal Pacu Pendidikan Dasar Jurnal PGSD UNU NTB* 2 (2022): 129–32, <http://ejournal.budiutomomalang.ac.id/index.php/prismatika/article/view/510>.

penerbit swasta belum memberikan referensi yang dapat membantu guru dalam memperoleh rujukan terkait bagaimana memfasilitasi pembelajaran berpusat pada siswa dengan efektif. Keterbatasan dalam mendapatkan referensi pelaksanaan Merdeka Belajar inilah yang kemudian juga menjadi guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai.

### 3. Akses yang Dimiliki dalam Pembelajaran

Adanya perbedaan akses digital dan akses internet yang belum merata juga menjadi kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan merdeka belajar. Dalam wacana pelaksanaan merdeka belajar yang disampaikan Mendikbud, ada enam model pembelajaran yang dapat diterapkan. Salah satu model belajar yang dapat dilakukan ialah daring. Kelancaran pelaksanaan belajar secara daring pastinya ditentukan dari akses digital dan internet yang dimiliki guru dan siswa. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai atau guru dan siswa yang aksesnya terbatas mengalami kesulitan. Perbedaan fasilitas, sarana prasarana dan kemudahan akses teknologi menjadi kendala yang terkadang dihadapi guru.

### 4. Manajemen Waktu

Dalam upaya transformasi proses pembelajaran, guru mungkin membutuhkan waktu lebih untuk belajar lagi supaya dapat adaptif dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Beberapa sekolah menentukan agenda yang cukup padat untuk melibatkan guru agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Belum tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang menyertai. Guru sebisa mungkin bergerak dan menemukan cara kreatif

inovatif dalam pembelajaran. Tidak semua guru mampu mengatur waktunya dengan baik, terutama dengan kesibukan atau persoalan yang lain yang sekiranya dihadapi.

#### 5. Kompetensi (*Skill*) yang Memadai

Minimnya pengalaman dalam implementasi kemerdekaan belajar juga menentukan kualitas atau kompetensi yang dimiliki guru. Beberapa guru bahkan mengalami kesulitan untuk menguasai atau menerapkan keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital seperti Ms. Word, membuat presentasi yang menarik dan menyenangkan, dan lainnya. Padahal, untuk melaksanakan merdeka belajar guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dengan melibatkan berbagai media atau model pembelajaran yang mendorong siswa. Kompetensi yang masih minim ini juga menjadi kendala guru dapat menjalankan merdeka belajar dengan cepat.

#### 6. Kurikulum Merdeka Berbeda dengan Kurikulum 2013

Ada banyak perbedaan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Dalam hal penyosialisasiannya, misalnya, pada saat Kurikulum 2013, guru-guru difasilitasi dengan pelatihan dan pendampingan berjenjang oleh pemerintah. Namun tidak pada Kurikulum Merdeka. Tidak ada pelatihan semacam itu. Namun guru dituntut untuk mempelajarinya secara mandiri lewat platform Merdeka Mengajar yang telah disediakan pemerintah.

## **Upaya Guru dalam Mengatasi Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SD/MI**

Kurikulum Merdeka yang dirancang lebih sederhana dan fleksibel diharapkan akan membuat guru fokus pada materi esensial dan peserta didik lebih aktif sesuai dengan minatnya. Guru juga akan mudah mendampingi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pembelajarannya.

Kebijakan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka merujuk pada Permendikbud Ristek No. 5 Tahun 2022 mengenai Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Keputusan Kepala BSNP No.008/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, pada Kurikulum Merdeka.

Kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan penerapan Kurikulum Merdeka dapat benar-benar berjalan seperti yang diinginkan. Namun kenyataannya masih banyak guru terkendala dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Kendala tersebut dapat berasal dari dalam diri guru yang bersangkutan maupun dari luar. Berbagai kendala tersebut di antaranya terkait dengan literasi, referensi, akses digital, kompetensi guru, dan pengelolaan waktu.

Permasalahan seperti ini sudah diantisipasi dan diberikan solusi oleh kemendikbudristek di dalam Kepmendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran tanggal 10 Februari 2022, lampiran II poin B halaman 2. Di sana di nyatakan:

1. Dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu berdasarkan struktur Kurikulum Merdeka, guru dapat diberikan:
  - a. Tugas tambahan
  - b. Tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tambahan lain ditambah dengan tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tugas tambahan lain sebagai koordinator proyek diberikan jika masih terdapat guru yang kekurangan jam mengajar dan diprioritaskan bagi guru yang masih kekurangan jam pelajaran akibat perubahan struktur kurikulum.
  - c. Beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam tatap muka per 1 (satu) rombongan belajar setiap tahun.<sup>40</sup>
  - d. Guru dan kepala sekolah harus belajar mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar.
  - e. Guru dan kepala sekolah belajar Kurikulum Merdeka dengan mengikuti seri webinar
  - f. Guru dan kepala sekolah belajar Kurikulum Merdeka di dalam komunitas belajar.

---

<sup>40</sup>Sopiansyah dkk., "Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)," 79–80.

- g. Guru dan kepala sekolah belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan.
- h. Guru dan kepala sekolah memanfaatkan pusat layanan bantuan (helpdesk) untuk mendapatkan informasi lebih.
- i. Guru dan kepala sekolah bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk implementasi Kurikulum Merdeka.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Rahimah, "Peningkatan Kemampuan Guru SMP Negeri 10 Kota Tebingtinggi dalam Menyusun Modul Ajar Kurikulum Merdeka Melalui Kegiatan Pendampingan Tahun Ajar 2021/2022," 127.